

**DAILY REPORT MEDIA RIVIEW
HUMAS SETDA KOTA BEKASI**

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
TANGGAL BERITA : 3 Januari 2019 INPUT BERITA : 3 Januari 2019									
1	Kemang View Diduga Manipulasi SLF	Wali Kota Diminta Mengevaluasi BEKASI SELATAN - Diduga telah terjadinya manipulasi laporan sertifikat layak fungsi (SLF) Apartemen Kemang View. Dugaan yang muncul kepada apartemen yang berlokasi di Jalan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi itu karena SLF miliknya dinilai tidak berbanding lurus dengan fakta fisik yang ada. Humas Paguyuban Warga Kemang View Kota Bekasi, Hitler Situmorang menjelaskan, SLF merupakan syarat utama untuk apartemen layak huni. Namun kenyataannya apartemen tersebut belum layak, tapi sudah memiliki SLF semenjak beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, demi keselamatan jiwa para penghuni maka meminta kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Efendi agar mengevaluasi atau melakukan pencabutan SLF Apartemen Kemang View. "Kita sudah sampaikan ke ownernya pada tahun lalu tapi dihiraukan. Artinya, tidak ada keseriusan dari pihak apartemen Kemang View. Kita juga minta kepada Wali Kota tolong SLF dibuat sebanding lurus. Jangan SLF ada tapi fakta pendukung tidak ada. Kalau belum layak tidak boleh keluar SLF," jelas Hitler kepada Harian Umum Metro Bekasi Ekspres.	Humas Paguyuban Warga Kemang View Kota Bekasi, Hitler Situmorang	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Perizinan	Negatif	Metro Bekasi (Media cetak)		
TANGGAL BERITA : 4 Januari 2019 INPUT BERITA : 4 Januari 2019									
1	Turap Ambles Masih Dibiarkan	BEKASI SELATAN - Turap kali yang berada di jalan Kemakmuran, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, ambles. Amblesnya turap kali tersebut juga memutus jalur pejalan kaki atau pedestrian di wilayah setempat. Pantauan Radar Bekasi, sepanjang 15 meter turap kali tersebut ambles sehingga memutus jalur pejalan kaki dan hingga saat ini belum ada perbaikan dari dinas terkait. Salah satu warga setempat yang juga pedagang kerang Ginanjar (35) mengatakan, amblesnya turap dan pedestrian tersebut saat hujan deras melanda beberapa waktu lalu. "Saat hujan deras kalau tidak salah pas magrib tiba-tiba terdengar bruk, ternyata pas dilihat turap kali yang ambles. Amblesnya turap itu kayanya disebabkan kontur tanah yang labil karena mungkin tidak kuat menahan air hujanyang terus turun, saat ambles memang hujannya saat itu awet tidak berhenti air kalinya juga sempet naik, ya mungkin bisa tergerus juga tanahnya," katanya kepada Radar Bekasi, Kamis (3/1).	pedagang kerang Ginanjar (35)	Dinas Bina marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	Infrastruktur	Negatif	Radar Bekasi (Media Cetak)	Titik ini sudah di survey dan akan diperbaiki tahun ini	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/ME DIA	TINDAKLANJUT	KET.
TANGGAL BERITA : 7 Januari 2019 INPUT BERITA : 7 Januari 2019									
1	Warga Swadaya Memperbaiki Jalan	BEKASI UTARA - Warga Perumahan Pondok Ungu Permai Raya, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, terpaksa secara swadaya menambak jalan yang rusak dengan puing-puing batu. Pasalnya, jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah meskipun kerusakannya sudah berlangsung lama. Pantauan Radar Bekasi, sarana infrastruktur jalan di wilayah setempat kondisinya sudah mengalami kerusakan banyak jalan berlubang yang bisa membahayakan para pengguna jalan sehingga warga sekitar menambalnya dengan puing-puing batu. Salah satu warga setempat Afrizal (43) mengatakan, jalan yang berada di tengah permukiman warga selama ini berlubang dan tergenang air jika musim hujan sehingga untuk menutupi jalan rusak tersebut warga menambal dengan menggunakan puing-puing batu.	warga setempat Afrizal (43)	Dinas Bina marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	Infrastruktur	Negatif	Radar Bekasi (Media Cetak)	Tindak lanjut dibuatkan surat ucapan terima kasih atas peran serta masyarakat dalam perbaikan jalan dari dinas ke warga	
TANGGAL BERITA : 8 Januari 2019 INPUT BERITA : 8 Januari 2019									
1	Choiruman: Kartu Sehat Salah Orientasi dan Tak Ada Benefit	Fasilitas Jaminan kesehatan Daerah (Jamkesda) berupa Kartu Sehat (KS) oleh Pemkot Bekasi dinilai memiliki orientasi yang salah. Ketua Komisi I DPRD Choiruman J Putro mengatakan orientasi kesehatan harusnya promotif preventif (pencegahan). Seperti diketahui fasilitas kesehatan Kartu Sehat sebelumnya memungkinkan seorang pasien untuk langsung datang ke Rumah Sakit apabila mempunyai keluhan kesehatan, namun saat ini telah diubah melalui sistem rujukan. “Rumah sakit cuma punya dua orientasi yaitu pengobatan dan rehabilitasi” katanya. Lebih lanjut Ia mengatakan sistem yang bagus sebenarnya adalah Puskesmas, karena yang dilakukan adalah promotif preventif. “Seseorang ketika datang didata, kemudian dari data tersebut Puskesmas melakukan sosialisasi kesehatan” tambahnya. Sebelumnya Choiruman mengkritisi pemkot Bekasi yang tidak mengintegrasikan KS kedalam JKN-KIS. Ia menyatakan sebenarnya melalui JKN-KIS negara sudah menanggung warganya melalui sistem asuransi. Sedangkan untuk fasilitas kesehatannya adalah tugas Pemerintah Daerah.	Ketua Komisi I DPRD Choiruman J Putro	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	Kartu Sehat	Negatif	Kanal Bekasi (Media Online)	Telah dilakukan penguatan Pelayanan Preventif Promotif melalui Puskesmas dengan dilaksanakannya kunjungan rutin ke rumah warga oleh tenaga kesehatan Puskesmas dan menambah jam operasional Puskesmas sampai dengan pukul 17.00 WIB	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/ME DIA	TINDAKLANJUT	KET.
TANGGAL BERITA : 9 Januari 2019 INPUT BERITA : 9 Januari 2019									
1	Dewan Minta OPD Tidak Lepas Tangan	BEKASI TIMUR - Persoalan yang terjadi pada Kemang View Apartment (KVA) menambah sederetan catatan buruk organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Bekasi yang memiliki kewenangan urusan bangunan di Kota Patriot ini. Selain diduga belum mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF), sederet fasilitas pendukung apartemen untuk menjamin keselamatan warganya juga kurang diperhatikan oleh dinas instansi terkait yang mengeluarkan izin operasional bangunan 18 lantai tersebut. Hal itu bisa dilihat dari peristiwa kebakaran yang terjadi pada gardu utama KVA pada 28 Desember 2018 lalu. Bahkan, dari peristiwa itu membuat warga KVA tidak terevakuasi dengan baik. Dugaan kuat, management KVA tidak melakukan manipulasi SLF karena tidak sesuai dengan peruntukan aslisnya. Biladitinjau saat kejadian kebakaran pada saat itu tidak terjadi pengoprasian genset. Bahkan alat pemadam kebakaran pun tidak ditemukan di area kebakaran. Sampai-sampai yang memanggil petugas pemadam kebakaran pun pihak warga, bukan melaikan pihak management atau emergency respon team (ERT) dari KVA.	Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi Anim Imanudin	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Perizinan	Negatif	Metro Bekasi (Media cetak)		
2	Ada oknum Bermain Pajak Reklame	Pengelolaan Pendapatan Tidak Satu Pintu BEKASI SELATAN - Tidak tercapainya PAD dari sektor pajak reklame menjadi perhatian GMBI Distrik Kota Bekasi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini menilai adanya kecarut-marutan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan hal tersebut. Bahkan mereka menyebut ada oknum yang bermain dalam pengurusan pembayaran pajak reklame tersebut. Hal Ini ditegaskan Ketua Distrik Kota Bekasi, Delvin saat ditemui Harian Metro Bekasi di lingkungan perkantoran pemkot Bekasi, kemarin (8/1). Menurutnya, banyak pengusaha yang telah memasang reklame kebingungan untuk membayar pajaknya. Karena, terkesan dipersulit dan dipermainkan oleh oknum OPD.	Ketua Distrik Kota Bekasi, Delvin	Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Pajak	Negatif	Metro Bekasi (Media cetak)	1. Bappenda telah membentuk Tim Optimalisasi Pajak dan retribusi Daerah sesuai Kepwal Kota Bekasi Nomor: 970/Kep.290 /Bapenda/V/2018 tentang Tim Satuan Tugas Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bekasi 2. Bapenda akan melaksanakan koordinasi kepada OPD terkait tentang permasalahan tersebut 3. Membuat undangan kepada OPD terkait untuk membahas masalah tersebut pada hari Kamis, 24 Januari 2019	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/ME DIA	TINDAKLANJUT	KET.
TANGGAL BERITA : 10 Januari 2019 INPUT BERITA : 10 Januari 2019									
1	2 Bulan TTK Belum Gajian Terlilit Utang Kemana-mana	BEKASI (Pos Kota) - Ribuan tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemkot Bekasi dua bulan belum gajian. Mereka bahkan memprediksi gaji baru akan diberikan rapel pada Maret 2019. Sejumlah pegawai TTK mengakui jika sampai kini mereka belum diberi gaji. Termasuk gaji Bulan Desember 2018 yang biasa dibayar akhir bulan malah belum diberikan. "Gaji kita telat karena uangnya dari APBD. Kalau PNS kan dari APBN," kata satu pegawai TTK, Rabu (9/1). Dia juga menyebut belum begitu tahu kapan akan bisa diberikan gaji. Nasib TTK ini juga sama dengan tunjangan daerah yang didapat PNS karena sumber tunjangan berasal dari APBD. Informasi yang dikumpulkan, ada sekita 11 ribu TTK yang menjadi tanggungan pemkot Bekasi melalui sejumlah SKPD yang ada. Mereka tersebar di sejumlah bidang, namun tampak pada di Dinas Perhubungan, Satpol PP dan juga Dinas Lingkungan Hidup.	Salah Satu Pegawai TTK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	Gaji	Negatif	Pos Kota (Media Cetak)	Pembayaran Gaji TTK Bulan Desember 2018 sudah dibayarkan pada Bulan Januari 2019 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 900/Kep.-BPKAD/II/2019 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak yang dibayarkan Bulan Januari 2019 atas Kinerja Bulan Desember 2018 di Lingkungan Pemkot Bekasi	
2	Gaji TTK Dirapel Dua Bulan	Honor yang Tertunda Dibayarkan Sekaligus Awal Februari 2019 KOTA BEKASI - Belasan ribu Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali harus bersabar. Itu terjadi setelah honorinya terancam tertunda selama dua bulan. Penundaan gaji TTK itu terjadi sejak Desember 2018 hingga Januari 2019. Diprediksi, gaji untuk 10.460 pegawai TTK itu baru dibayarkan akhir Februari 2019. Jadi, gaji puluhan ribu TTK akan dirapel selama dua bulan. Penundaan itu terjadi karena terbentur administrasi pencairan anggaran pada APBD 2019. "Gaji kita sering telat karena dananya bersumber dari APBD Kota Bekasi. Berbeda dengan gaji PNS yang dibayarkan melalui APBN," terang GT, seorang TTK di lingkungan Pemkot Bekasi kepada Indopos, Rabu, (9/1). Pria itu mengaku pasrah dengan rencana rapel gajinya selama dua bulan tersebut.	GT, Salah Seorang TTK di Pemkot Bekasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	Gaji	Negatif	Indopos (Media Cetak)	Pembayaran Gaji TTK Bulan Desember 2018 sudah dibayarkan pada Bulan Januari 2019 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 900/Kep.-BPKAD/II/2019 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak yang dibayarkan Bulan Januari 2019 atas Kinerja Bulan Desember 2018 di Lingkungan Pemkot Bekasi	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/ME DIA	TINDAKLANJUT	KET.
3	Berubah Warna Setiap Saat	Diduga Kali Tercemar Limbah Industri MEDAN SATRIA - Kali kecil yang berada di Jl. Raya Perjuangan, Kelurahan Perjuangan Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, diduga tercemar limbah industri yang berada di wilayah setempat. Air kali tersebut diketahui kerap mengeluarkan perubahan warna serta bau tidak sedap. Pantauan Radar Bekasi, air kali kecil tersebut berwarna kemerahan dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Salah satu warga setempat Arman (34) mengatakan perubahan warna air kali kecil tersebut di duga berasal dari limbah industri yang berada di wilayah setempat dan perubahan warna air kali itu hanya terjadi di hari-hari tertentu. "Air kali itu berubah warna seperti kemerahan kecoklatan di hari-hari tertentu saja, tidak setiap hari. Kalau sudah berubah pasti tercium aroma yang kurang enak apalagi kalau ke hirup baunya bikin pusing, coba saja lihat banyak juga lemak-lemaknya," katanya kepada Radar Bekasi, Rabu (9/1)	warga setempat Arman (34)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	Kebersihan	Negatif	Radar Bekasi (Media Cetak)	Untuk kali kecil yang terletak di Jl. Raya Perjuangan tidak menimbulkan bau sama sekali dikarenakan kali yang melintas di jalan Raya Perjuangan merupakan sumber air baku PDAM Harapan Indah. Ada kali yang menimbulkan bau terletak di jalan Raya Perjuangan di depan kantor Kelurahan Perjuangan. Hal ini sudah kami sampaikan ke dinas mengenai dugaan pencemaran air yang dilakukan industri yang berlokasi di sepanjang aliran kali tersebut untuk di tindak lanjuti dikonfirmasi juga atas berita tersebut untuk lokasi persisnya RT dan RW atau patokan lokasi agar kita bisa konfirmasi ke lapangan langsung ke titik sasaran	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/ME DIA	TINDAKLANJUT	KET.
TANGGAL BERITA : 16 Januari 2019 INPUT BERITA : 16 Januari 2019									
1	Warga Minta Jalan dan Saluran Air Diperbaiki di Jalan Burangrang dan Tangkuban Perahu Kota Bekasi	WARTA KOTA, BEKASI --- Warga Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi minta pemerintah memperbaiki saluran air dan jalan di Jalan Burangrang dan Tangkuban Perahu. Perbaikan itu diminta warga karena jalan sudah rusak dan kerap tergenang air saat hujan deras. Andi (32), warga setempat, mengatakan, jalan lingkungan itu banyak rusak selalu tergenang air saat hujan. "Aspalnya banyak terkelupas, banyak lubang juga. Tolong segera diperbaiki," katanya kepada Warta Kota, Selasa (15/12/019). Perbaikan jalan dan saluran itu juga diminta oleh Edi Suhadi, Ketua RW 11 Kayuringin Jaya. Edi Suhadi mengungkapkan bahwa wilayahnya dari perempatan Kayuringin kerap terjadi limpasan air hujan dari Jalan Ahmad Yani. Dia berharap, saluran di Jalan Burangrang dan Jalan Tangkuban Perahu segera diperbaiki sehingga apabila hujan deras genangan air tidak terjadi. "Harapan kita dari dulu perbaikan jalan lingkungan dan saluran air. Tapi belum dilakukan juga, kita sudah sering usulkan dari tahun 2013 tiap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)," katanya. Ketua RT itu menambahkan, usulan perbaikan jalan dan saluran air di Jalan Burangrang dan Tangkuban Perahu akan kembali dimasukkan dalam Musrenbang tahun 2019. "Perbaikan jalan sama saluran air di kedua jalan itu sudah kita masukkan usulan di Musrenbang untuk RKPD 2020," ucap Edi Suhadi.	Andi (32), warga setempat dan Edi Suhadi, Ketua RW 11 Kayuringin Jaya	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	Infrastruktur	Negatif	Warta Kota (Media Online)	Titik tersebut sudah dilakukan survey terkait saluran air jalan burangrang dan jalan tangkuban perahu, penanganan jangka pendek akan di lakukan normalisasi oleh tim pematusan untuk janka panjang perlu peningkatan saluran jalan burangrang	
2	Pemkot Bekasi Cuek Tanggapi Keluhan Warga Soal Urban Sky	KanalBekasi.com – Pembangunan apartemen Urban Sky di Jalan Galaxy I, kelurahan Jaka Mulya, Bekasi Selatan yang disoal warga terus menuai polemik. Warga menilai pembangunan apartemen tersebut tidak mengindahkan hak-hak warga. Apalagi warga merasa tidak pernah menandatangani izin lingkungan apartemen tersebut. Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Chairuman J putro menyatakan walau izin lingkungan saat ini sudah tidak diperlukan lagi namun bukan berarti hak-hak warga dilangkahi. "Kalau bisa di cek kembali IMB apartemen tersebut, karena syarat IMB adalah mampu menjawab klaim-klaim warga sekitar dan telah lolos izin Amdal, Amdal Lalin dan juga dampak lingkungan" Terangnya, Selasa (15/1). Ia menambahkan banyaknya pembiaran bangunan liar tak ber IMB adalah efek dari kurangnya komunikasi antar dinas terkait. "Itu akhirnya jadi pemicu persoalan antara warga dan pihak pengembang apartemen" Tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, perwakilan warga perumahan Pelangi bernama Randy Bagus Yudha menyatakan warga sekitar mengeluhkan pembangunan Apartemen Urban Sky dikerjakan hampir 24 jam dan merusak tembok rumah warga. Ia dan warga menurutnya sudah melakukan protes ke kelurahan dan Pemkot Bekasi namun tidak pernah ditanggapi. (sgr)	Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Chairuman J putro	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	Perizinan	Negatif	Kanal Bekasi (Media Online)		

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/ME DIA	TINDAKLANJUT	KET.
3	Sekretaris IWO Kota Bekasi Sebut Kesbangpol Tidak Becus Kerja	TOPTIME.CO.ID – HILANGNYA berkas pendaftaran legalitas organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) di Kesbangpol Kota Bekasi menuai kritikan dari Sekretaris IWO kota Bekasi, Saut Manulang. Menurut Saut Manulang, dengan adanya informasi dari staf Kesbangpol bahwa berkasnya hilang, sudah menunjukkan kinerja Kesbangpol Kota Bekasi tidak profesional. "Ini pelayanan macam apa, kok tidak profesional. Berkas yang kita daftarkan sejak bulan Juli 2018 tidak disimpan dengan baik," ungkap Saut, Selasa (15/1/2019). Lanjutnya, banyak yang harus dirubah mindset dari aparaturnya di Kesbangpol termasuk Kepala Dinasnya juga yang tidak kooperatif. "Kepala Dinasnya saja tidak kooperatif, seperti orang sibuk sendiri, komunikasinya payah. Kami merasa diremehkan oleh Kesbangpol." tandasnya. (*)	Sekretaris IWO kota Bekasi, Saut Manulang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	Pelayanan	Negatif	Toptime (Media Online)	Hanya terjadi kesalahpahaman dari pihak IWO dikarenakan ada pergantian kasubag. Berkas ijin lapor domisili keberadaan ormas tidak hilang hanya terselip dan sudah ditandatangani.	
TANGGAL BERITA : 17 Januari 2019 INPUT BERITA : 17 Januari 2019									
1	Gagal Mendapatkan Adipura, Pemerintah Kota Bekasi Tidak Punya Gerakan Masif	WARTA KOTA, BEKASI--- Di usia yang akan genap 22 tahun pada 10 Maret 2019 mendatang, Kota Bekasi belum pernah menyabet penghargaan bergengsi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro mengatakan, sebenarnya Kota Bekasi sempat mendapat penghargaan Adipura pada tahun 2010. Hanya saja penghargaan itu dicabut karena diduga tersandung hukum. "Tapi setidaknya pernah menerima meski sesudah itu dicabut lagi," kata Chairoman. Chairoman menilai, Kota Bekasi" Pemerintah Kota Bekasi tidak memiliki gerakan masif Adipura. Seharusnya, kata dia, pemerintah lebih menggandeng peran masyarakat agar lebih aktif sehingga kekurangan dalam pencapaian Adipura bisa terisi. "Gerakan Adipura belum menjadi gerakan masyarakat, itu yang paling krusial," jelasnya. Bukan itu saja, Chairoman menjelaskan, selama ini gerakan Adipura kerap dijadikan program pencitraan kepala daerah, sehingga instrumen yang berperan bukan dari masyarakat. "Jangan pernah gerakan Adipura dijadikan program pencitraan," jelasnya. Koordinator Lembaga Kajian Lingkungan (Environment Community Union) daerah setempat, Benny Tunggul, mengatakan, Kota Bekasi seharusnya bisa banyak belajar dari kota-kota lain seperti Kabupaten Ciamis dan Gorontalo. Mereka sering meraih Piala Adipura. "Saya pikir sebagai kota mitra ibu kota sudah harus mencari cara pengelolaan sampah yang baik," ucapnya. Karena selama ini, penekanan volume sampah tidak mengurangi banyak pembuangan TPA Sumur Batu. Sebab, sampah yang dihasilkan masyarakat cukup besar yakni 700 ton per hari. "Selain bank sampah, harus ada industrialisasi sampah di lokasi pembuangan," katanya.	Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	Aipura	Negatif	Warta Kota (Media Online)	Sedang dilakukan review / evaluasi terhadap capaian penilaian adipura tahun 2018, selanjutnya akan diekspose dan dibuatkan rencana strategis di dalam meraih adipura tahun 2019	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TONE	WARTAWAN/MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
TANGGAL BERITA : 18 Januari 2019 INPUT BERITA : 18 Januari 2019									
2	Ogah Pindah, PKL Pasar Baru Bekasi Nilai Tempat Relokasi Kumuh	Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Baru Bekasi di Jalan Muh Yamin dan Juanda Bekasi Timur enggan direlokasi ke Blok II. Salah seorang pedagang sayuran mengungkapkan enggan direlokasi ke dalam Pasar Baru dikarenakan khawatir akan sepi pembeli. Terlebih fasilitas di lokasi relokasi kurang memadai. "Sepi jualan didalam, terpaksa saya jualan di jalan lagi. Ya kita kan butuh hidup butuh makan," kata pedagang pria berkemeja yang engga ditanya namanya. Pantauan Wartakota, tempat relokasi di Blok II Pasar Baru Bekasi berada di gedung bagian belakang. Lokasinya terlihat kosong, hanya ada beberapa saja pedagang yang jualan. Terlihat lokasi relokasi itu bukan lokasi baru dibangun. Lantai dilokasi itu rusak, becek, dan kotor. Lokasi tempat berdagang ada yang menggunakan roling door dan ada yang hanya sekat-sekat tembok saja. Dinding itu juga terlihat kotor dan kumuh. Hery pedagang makanan didalam yang menempati Pasar Baru blok II mengatakan, lokasi blok II ini hanya ramai ditempati pada malam hari. Tetapi ketika siang hingga sore para pedagang berjualan di jalan. "Sepi kalau siang mah, ramainya malam. Siang kan jualan di jalan. Ada juga memang lapak yang masih kosong," ujarnya Sebelumnya, Satpol PP Kota Bekasi tak akan pernah bosan untuk melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Baru di Jalan Muh Yamin dan Juanda Bekasi Timur, meksipun keberadaan mereka kerap muncul kembali bahkan sehari pasca penertiban, pada Selasa (15/1/2019) lalu. "Hari ini kita lakukan penertiban lagi, terus bakal kita tertibkan tiap hari. Kita akan terus mendorong PKL agar mau pindah ke tempat relokasi yang sudah disiapkan," kata Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Cecep Suherian dilokasi Pasar Baru Bekasi, Kamis (17/1/2019).	Kepala Satpol PP Kota Bekasi dan Salah seorang pedagang sayuran	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	Relokasi Pasar	Negatif	Warta Kota (Media Online)		